

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN BENCANA LONGSOR
OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN AGAM**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik S.AP*



Oleh :

**SUCI NURHIDAYATI
TM/NIM :2016/16042186**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penanggulangan Bencana Longsor oleh
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Kabupaten Agam

Nama : Suci Nurhidayati

NIM/TM : 16042186/ 2016

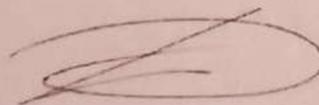
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 November 2020

**Disetujui oleh,
Pembimbing**



Dr. Zikri Alhadi, S.IP., MA
NIP. 198406062008121003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 11 November 2020 Pukul 11.00 WIB s/d 11.30 WIB

Efektivitas Penanggulangan Bencana Longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam

Nama : Suci Nurhidayati
NIM/TM : 16042186/ 2016
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 11 November 2020

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr.Zikri Alhadi, S.IP., MA	1.....
Anggota	Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D	2.....
Anggota	Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si	3.....

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M. Pd., M.Hum.
NIP.19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Nurhidayati
Nim : 16042186
Program studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Penanggulangan Bencana Longsor oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 November 2020

Saya yang menyatakan,



Suci Nurhidayati

016/16042186

ABSTRAK

Suci Nurhidayati

**Efektivitas Penanggulangan Bencana Longsor
oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Kabupaten Agam**

Pembimbing

Dr. Zikri Alhadi, S.Ip., M.A

Penelitian yang ditulis bermaksud untuk mengetahui Efektivitas penanggulangan bencana longsor yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Agam dan juga untuk mengetahui akar permasalahan dan dicari solusinya. Pada penelitian yang dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif, teknik menentukan informan penelitian dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yakni dengan reduksi penyajian data dan penarikan kesimpulan, teknik keabsahan data peneliti yaitu triangulasi sumber. Efektivitas penanggulangan bencana longsor yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten agam dapat dilihat dari sejauh mana tujuan dari kegiatan ataupun program penanggulangan yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. tidak efektifnya penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam penyebab utama adalah faktor alam dan juga permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten agam masih kurang optimal dalam menanggulangi bencana longsor. Semua itu dilihat dari faktor pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam dalam menanggulangi bencana longsor.

Kata kunci: *Efektivitas, Penanggulangan bencana*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan

judul **“Efektivitas Penanggulangan Bencana Longsor Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam”**. Tujuan penulis menulis skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Seluruh kegiatan ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Ganefri,M.Pd.,Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr.Siti Fatimah,M.Pd.,M,Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Aldri Frinaldi,SH.,M,Hum,Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Zikri Alhadi,S.IP.,M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D Bapak Rahmadani Yusran, S.Sos., M.Si selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak M.Luthfi selaku kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Agam
7. Ibuk Saloma, selaku Sub Bagian Umum di kantor BPBD Kabupaten agam yang telah memberikan izin untuk penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian.
8. Para informan dari kantor BPBD Kabupaten Agam, yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
9. Bapak Jhon Hendra,selaku Wali Nagari Sungai Batang,KabupatenAgam
10. Bapak Reynal Basri Selaku Sekretaris Nagari Tanjung Sani yang banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Para informan dari Masyarakat Kabupaten Agam yang terdampak bencana longsor,yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian.
12. Teristimewa untuk Abah tercinta dan Amak tersayang yang telah memberikan do'a, dukungan dan semangat kepada Uci untuk terus menjadi anak yang percaya diri dan sukses. Dengan do'a, dukungan dan semangat itulah uci dapat menyelesaikan perkuliahan ini.

13. Kepada yang teristimewa Dani fardi dan temen SMA ku Olaa menyeh, makasi banyak suportnya, makasi juga telah menemani drama penelitianku, terimakasih atas dukungannya dan sudah mau direpotkan dan yang teristimewa juga kepada sahabat-sahabatku selama perkuliahan, Rini, KakRos, Suci, Ayu terimakasih untuk dukungannya sehingga saya bisa lulus tepat waktu dan menyelesaikan skripsi ini. ILY. Tetap semangaaaat gaeess.

14. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan dan untuk keluarga besar Administrasi Publik angkatan 2016 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

terimakasih untuk ide-ide, dukungan dan semangatnya. Semoga petunjuk dan motivasi yang bapak, ibu dan teman-teman berikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Padang, November 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
Bab II Tinjauan Pustaka	
A. Kajian Teori	13
1. Efektivitas	13
a. Konsep Efektivitas	13
b. Indikator Efektivitas.....	16
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas	19
2. Konsep penanggulangan bencana	24
a. penanggulangan Bencana.....	26
b. Indikator penanggulangan Bencana	28
c. Defenisi Longsor.....	29
3. Konsep manajemen Bencana	33
4. Penelitian Relevan.....	37
5. Kerangka Konseptual	40
Bab III Metode Penelitian	
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Fokus Penelitian	45
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Informan Penelitian.....	46
E. Jenis dan Sumber Data	48
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
G. Uji Keabsahan Data.....	49
H. Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	52

1. Gambaran Umum Kabupaten Agam.....	52
2. Gambaran Umum BPBD kabupaten agam	55
B. Temuan Khusus.....	61
1. Efektivitas penanggulangan bencana longsor oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten agam.....	61
2. Kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten agam dalam menanggulangi bencana longsor.....	72
3. Upaya yang dilakukan oleh BPBD kabupaten agam dalam menanggulangi bencana longsor	75
C. Pembahasan	83
1. Efektivitas penanggulangan bencana longsor oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten agam.....	83
2. Kendala yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten agam dalam menanggulangi bencana longsor.....	87
3. Upaya yang dilakukan oleh BPBD kabupaten agam dalam menanggulangi bencana longsor	88
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
Daftar Pustaka.....	95
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Informan Penelitian.....	47
Tabel 2.2 Luas wilayah kabupaten agam dengan masing-masing kecamatan.....	55
Tabel 2.3 struktur organisasi.....	60
Tabel 2.4 peralatan penanggulangan bencana BPBD kabupaten agam.....	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Kerangka Konseptual	40
Gambar 1.2 peta kabupaten agam.....	53
Gambar 1.3 peta rawan bencana longsor.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang wilayahnya di anugerahi oleh Tuhan yang Maha Esa dengan sumber daya alam yang berlimpah, tanahnya yang subur, alamnya yang indah beserta kandungan kekayaan di bumi nusantara yang patut disyukuri, namun dibalik kekayaan alamnya negara ini memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. menyimpan segudang potensi bencana baik alam maupun non alam, mulai dari bencana gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan terhadap jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Wilayah Indonesia terletak pada kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografi yang memungkinkan terjadinya bencana. Hampir 80% wilayah kabupaten/kota di seluruh Indonesia memiliki potensi bencana (rawan bencana). (Rahmawati 2013).

Salah satu provinsi yang berisiko bencana adalah Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang terletak di pesisir barat bagian tengah pulau Sumatera dengan ibu kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia di sebelah barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu di sebelah selatan, Provinsi Riau di sebelah timur dan Provinsi Sumatera Utara di sebelah utara. Provinsi Sumatera Barat memiliki dataran rendah di pantai barat serta dataran tinggi vulkanik di sebelah timur dibentuk oleh

bukit barisan. Garis pantai provinsi dari pasaman sampai pesisir selatan berhadapan langsung dengan samudera hinda sepanjang 375 km... (BNPB 2011).

Provinsi Sumatera Barat memiliki 19 Kabupaten, salah satunya Kabupaten Agam. Kabupaten agam merupakan kawasan perbukitan/pegunungan dan pesisir yang didominasi oleh kawasan lindung dengan basis ekonomi pertanian (perkebunan lahan kering dan hortikultura) namun sekaligus adalah kawasan rawan bencana dengan sebaran potensi bahaya tsunami, abrasi, gerakan tanah/longsor dan gempa serta letusan gunung berapi. Demikian juga terhadap pemenuhan berbagai infrastruktur yang masih terbatas. Kabupaten Agam mempunyai kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah, dengan ketinggian berkisar antara 0 - 2.891 meter dari permukaan laut. Kabupaten Agam itu sendiri merupakan daerah yang rawan akan terjadinya bencana longsor, bahkan hampir setiap tahun terjadi nya longsor. (Agamkab 2020).

Sadar akan posisi sebagai negara yang rawan akan bencana, pemerintah membentuk badan nasional penanggulangan bencana sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal penanggulangan bencana yang dibentuk berdasarkan peraturan presiden nomor 8 tahun 2008 tentang badan penanggulangan bencana, yang di realisasikan sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang pembentukan badan nasional penanggulangan bencana. Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 pasal 18 di dalam mangamanatkan dibentuknya badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Di tingkat provinsi, kabupaten/kota. Pembentukan BPBD ini di dasarkan

pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada dewan perwakilan rakyat daerah DPRD yang harus berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri (kemendagri) dan BNPB, hingga saat ini sebagian besar provinsi yang rawan bencana di Indonesia secara hukum telah diwajibkan mendirikan BPBD. Dalam Undang-Undang No 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang dimaksud dengan bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat baik oleh faktor alam maupun faktor non alam.

Bencana alam itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari oleh manusia atau disebut sebagai bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain, Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Gunung Meletus, Angin Topan, Kekeringan Akibat Kemarau Panjang, dan juga Tanah Longsor. Dan ini adalah fenomena yang sudah melekat di bumi, sampai sekarang manusia belum bisa mengatasi munculnya bahaya itu. Menurut Suryono (dalam Diah Wulansari 2017:410), "Bencana Tanah longsor merupakan salah satu jenis bencana yang cukup potensial terjadi di Indonesia yang mengakibatkan kerugian material maupun non material jika tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Di Indonesia kejadian bencana itu sendiri menjadi tantangan besar bagi Pemerintahan Indonesia dan Warga Negara Indonesia karena dapat mengganggu sistem pertahanan Negara dan juga mengancam keselamatan penduduk".

Tanah longsor merupakan proses dari geologi yang disebut dengan mass wasting yang sering disebut juga sebagai gerakan massa (mass movement), yang

merupakan perpindahan massa batuan dan tanah dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena gaya gravitasi. Seiring dengan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tanah longsor, maka perlu diidentifikasi daerah yang memang rawan akan tanah longsor, penting dilakukan agar dapat diketahui penyebab utama terjadinya longsor, sehingga dapat menjadi rujukan untuk melakukan mitigasi bencana longsor berikutnya....(Dhuha Ginanjar, dkk 2016:328).

Kejadian bencana merupakan peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, ini disebabkan bukan hanya karena faktor alam akan tetapi faktor non alam dan juga manusia itu sendiri, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Tanah longsor bukan hanya mengenai musibah bencana alam akan tetapi tak kurang warga juga bermukim di tempat-tempat yang memang rawan longsor. sebagai wilayah yang rawan akan bencana, pemerintah indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam mengantisipasi sebelum ataupun setelah terjadinya bencana yaitu mitigasi bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi...(Gunawan Pratama 2017:60)

Seperti halnya di beberapa daerah Kabupaten Agam , daerah yang disebutkan rawan terjadinya bencana longsor atau disebut dengan daerah zona merah. sebenarnya bencana-bencana yang terjadi di daerah bukan hanya semata-mata karena kesalahan dari masyarakat. Akan tetapi perlunya peran maksimal dari pemerintah dalam hal pencegahan dan penanggulangan bencana tersebut. misalkan terjadi bencana alam seperti longsor. Ketika longsor itu terjadi

pemerintah hanya bisa membantu seadanya memberikan pertolongan untuk menghindari korban, tetapi untuk mencegah agar tidak terjadinya longsor lagi di daerah rawan longsor tentu belum bisa direalisasikan dengan baik. Disini lah diperlukannya manajemen dan rencana dalam melakukan mitigasi agar bencana di daerah rawan tersebut tidak terjadi lagi, walaupun bencana tersebut tidak dapat dihindari, setidaknya pemerintah harus mampu mengurangi dampak dari terjadinya bencana tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD kabupaten agam yaitu Bapak Syafrizal mengatakan bahwa :

“...untuk kabupaten agam kita mempunyai 16 kecamatan dari 16 kecamatan itu rata-rata memang rawan longsor karna topografi daerahnya perbukitan, diantaranya kecamatan tanjung raya, kecamatan malalak, kecamatan palupuh, kecamatan baso, 80% dari 16 kecamatan tersebut merupakan rawan akan terjadinya bencana longsor. Dan upaya yang kami lakukan dalam penanggulangan bencana yaitu kita selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat karna longsor atau penyebab dari kejadian longsor sesuai dengan data-data yang ditemukan dilapangan ini sering terjadi masyarakat dengan ketidak tahuannya melakukan pengrusakan hutan yang berada dilingkungan-nya tentu hal ini akan mengakibatkan banjir atau tanah longsor, dan kami selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang berada dilingkungan untuk selalu menjaga kelestarian hutan, karena dampaknya cukup berat bagi masyarakat dengan habsnya kayu-kayu yang di tebang secara liar oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.”(wawancara 26 maret 2020)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa terjadinya longsor tidak hanya disebabkan oleh kondisi alam saja akan tetapi juga oleh ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dan juga perlunya peran dari pemerintah dalam mencegah terjadinya bencana. Dalam hal ini ketika terjadinya bencana Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi fokus rekontruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan

terhadap pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan yang harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran belanja Negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana...(Gunawan Pratama 2017:4).

Pemerintahan membutuhkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi suatu bencana. Kesiapsiagaan diri masyarakat akan membuat masyarakat lebih siap ketika bencana melanda. Kesiapan masyarakat ini akan meminimalkan dampak negative yang muncul dari suatu bencana yang terjadi. Bencana longsor yang datang secara berkala biasanya akan membentuk kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bahaya longsor yang ada. Kesiapsiagaan terbentuk oleh pengalaman mereka dalam menghadapi bencana longsor.

Menurut UU RI No. 24 Tahun 2007...Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna, dan kesiapsiagaan menurut Caeter (1991) adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintahan, organisasi, masyarakat, komunitas, dan individu untuk mampu menanggapi situasi bencana secara cepat dan tepat guna. Termasuk ke dalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan bencana, pemeliharaan dan pelatihan personil.

Selain adanya payung hukum yang kuat dalam hal penanggulangan bencana, hal lain yang diperlukan untuk mendukung suksesnya pengurangan risiko bencana di Indonesia termasuk pada daerah Kabupaten Agam adalah masyarakat yang sadar bencana. Menjadi tugas pemerintah dan semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan serta peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan atau disebut dengan istilah sadar bencana. Dalam upaya membangun masyarakat atau komunikasi yang sadar bencana ini, pendidikan kebencanaan menjadi pintu masuk yang cukup penting dan strategis dalam mengurangi risiko bencana. Dengan pendidikan kebencanaan, diharapkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia maupun dunia dapat terwujud, sehingga dapat menikmati hidup lebih aman, tenang dan sejahtera...(Sriharini, 2010:162)

Masalah lain dalam penanggulangan bencana terdapat pada antisipasi bencana itu sendiri, upaya antisipasi menjadi sebuah masalah tersendiri. Misalnya kejelasan struktur sistem peringatan dini, kelembagaan yang fleksibel dan sigap tanggap darurat, serta sosialisasi yang efektif bagi seluruh lapisan masyarakat. Fenomena bencana alam secara nasional membuktikan bahwa pemerintah memerlukan tindakan yang lebih efektif untuk menangani bencana mulai tahap antisipasi...Wijaya (dalam Burhanudin 2017:186).

Permasalahan mengenai longsor yang sering terjadi di Kabupaten Agam salah satunya di Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya. Seperti yang telah diberitakan (www.harianhaluan.com) bahwa pada tanggal 22 Desember 2019 telah terjadi longsor yang mengenai rumah, kantor, dan jalan dilokasi itu,

sebelumnya pada tanggal 20 November 2019 longsor juga terjadi di jorong Galapung Nagari Tanjung Sani yang menyebabkan 13 rumah, 1 madrasah dan 1 mesjid rusak, selain itu material longsor juga menutupi akses jalan. Hal ini terjadi diakibatkan karena curah hujan dengan intensitas yang tinggi, bukan hanya karena curah hujan, seperti yang diberitakan (<https://news.detik.com/banjir>) bandang disertai longsor yang melanda Nagari Tanjung Sani kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. Balai konservasi sumberdaya alam (BKSDA) menyebutkan adanya praktik Illegal Logging di perbukitan kawasan nagari Tanjung Sani. pada tanggal 19 Desember 2019 seperti yang diberitakan (www.antaranews.com) Tanah longsor juga terjadi di kecamatan Baso, Canduang, Palupuh dan Ampek Koto.

Kepala bidang kedaruratan dan logistik BPBD Kabupaten Agam Bapak Syafrizal mengatakan :

“...disaat terjadinya bencana adanya kendala yang tentunya laporan-laporan dari masyarakat sangat kami butuhkan yang artinya saat terjadinya bencana memang kami sudah ada kelompok siaga bencana mulai dari kelompok nagari dan kelompok kecamatan, dalam hal ini kami menerima adanya keterlambatan laporan dari masyarakat ke Posdal kami, yang mengelola informasi kebencanaan laporan pusat pengendalian operasional BPBD Kabupaten Agam. Nah dalam hal ini strategi kami yaitu selalu membangun komunikasi atau koordinasi yang intensif dengan nagari-nagari dan kecamatan yang terdampak bencana.”(wawancara 26 Maret 2020)

Desa tangguh bencana merupakan pengembangan program pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas yang mampu mengantisipasi dan meminimalisasi ancaman bencana dengan cara melakukan adaptasi, dan apabila terdampak bencana mereka dengan cepat membangun kehidupannya menjadi normal kembali. Ini menjadi salah satu perwujudan dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman

bencana. (Chintia Deby, 2019:35) dalam program ini di kabupaten agam pernah dilakukan namun dalam beberapa tahun kedepan terjadi stagnan dalam desa tangguh bencana dan program ini dilakukan melalui pemerintahan nagari karena terkendala anggaran dan program ini dilimpahkan kepada pemerintahan nagari.

Selain itu ada program penanggulangan yang dilakukan yaitu 1 hari menanam 5 pohon, gerakan yang dilakukan oleh BPBD kabupaten agam ini guna mencegah terjadinya bencana, dan program tersebut sudah berjalan normal dan bisa dikatakan Efektif dalam penanggulangan bencana, namun pada saat ini program tersebut terkendala oleh kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana lainnya, terutama terkendala oleh bencana Covid-19. Program ini dilakukan guna mengurangi risiko bencana, hal ini dilakukan dengan cara pemangkasan pohon yang berisiko bencana, pohon yang di potong tersebut dinilai sudah rapuh dan tua, sehingga dikhawatirkan tumbang dan mengancam keselamatan masyarakat, bahwasanya ancaman pohon tumbang merupakan salah satu jenis bencana alam yang potensial terjadi di kabupaten agam, kondisi itu tidak lepas dari faktor geografis. Sementara itu untuk jenis pohon yang di tanam sebagai tanaman pengganti selain ramah lingkungan namun juga bernilai ekonomis, sementara itu untuk lahan konservasi yang berada di areal berbukitan bisa juga ditanam jengkol, petai atau cengkeh yang memiliki akar serabut yang kuat. Berdasarkan permasalahan diatas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terkait “Efektivitas Penanggulangan Bencana Longsor Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Agam”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun identifikasi masalahnya adalah :

1. Adanya potensi bencana longsor pada daerah yang rawan longsor di kabupaten agam
2. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya bencana longsor di kabupaten agam, terutama pada daerah-daerah yang rawan terjadinya longsor
3. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan bencana longsor
4. Minimnya SDM atau Ahli secara teknis di bidang penanggulangan bencana longsor di BPBD kabupaten agam
5. Lambatnya informasi laporan bencana yang diberikan oleh masyarakat kepada BPBD kabupaten agam

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan mengingat keterbatasan kemampuan penulis bahkan luasnya aspek yang akan di teliti dan agar peneliti lebih terarah dan terfokus, karena menimbang waktu dan biaya yang terbatas maka penelitian ini di batasi pada “Efektivitas Penanggulangan Bencana Longsor Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Agam”.

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Penanggulangan Yang Dilakukan Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Terhadap Bencana Longsor Di Kabupaten Agam?

2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam?
3. Apa saja upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui tentang:

1. Efektivitas penanggulangan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD terhadap bencana longsor di Kabupaten Agam.
2. Kendala yang dihadapi oleh BPBD dalam penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam
3. Upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam

F. Manfaat penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, maka manfaat pelaksanaan penelitian yang diharapkan ini adalah :

1. Manfaat kegunaan teoritis

Secara teoritis Sebagai bahan masukan dan informasi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan referensi terkait efektif atau tidaknya penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Agam.

2. Manfaat kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini sangat berguna untuk menyampaikan pengetahuan kepada pembaca sebagai informasi penting mengenai peran badan

penanggulangan bencana daerah atau sering disebut BPBD dan juga sebagai referensi bagi peneliti lain yang mempunyai minat yang sama yaitu untuk mengkaji masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi dari sebuah lembaga/organisasi

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti memiliki pengaruh, akibat serta efek yang ditimbulkan. Dilihat dari asal katanya efektivitas berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang artinya berhasil, sesuatu yang dilakukan dan berhasil dengan baik, (Pabundu Tika 2014:129). Konsep efektivitas merupakan konsep yang luas dan mencakup berbagai faktor di dalam maupun di luar organisasi.(Donni Juni dan Agus Garnida 2013:11).

Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program ataupun kegiatan yang sesuai dengan tujuan,(Mahmudi 2015:86).Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan atau sasaran yang tepat dan mencapainya. Oleh karena itu efektivitas menunjuk pada kaitan output atau apa yang sudah dicapai atau hasil yang sudah dicapai dengan tujuan atau apa yang sudah ditetapkan dalam rencana atau hasil yang diharapkan. Suatu organisasi dikatakan efektif jika output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.

Menurut James I. Gibson (dalam Afner Son, 2018) efektivitas merupakan pencapaian sasaran yang menunjukkan derajat efektif. Pada dasarnya efektivitas menunjukkan pada taraf tercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisiensi, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektivitas lebih menekankan pada hasil yang dicapai sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dituju itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Dengan kesimpulan suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana dicapai maka semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektif dapat diartikan juga sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Media pembelajaran dikatakan efektif apabila memenuhi kriteria.

Sedangkan Sondang P. Siagian 2001 (dalam Erdina, Tias Vela 2016) mendefinisikan efektivitas sebagai pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya suatu sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Adapun menurut Hasibuan (2002) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah tercapainya sasaran atau tujuan-tujuan dari suatu organisasi yang telah ditentukan sebelumnya, dimana efektivitas menunjukkan seberapa

efektifnya suatu instansi dalam mencapai tujuannya, dan dari efektivitas dapat dilihat seberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dengan jelas dan tepat sasaran.

Lubis dan Husein (dalam Nuraini dkk,2018:53-54) menyebutkan ada 3 pendekatan dalam indikator efektivitas organisasi yaitu :

- 1) Pendekatan sumber (*resource approach*) yaitu melihat efektivitas mulai dari input. Pendekatan yang mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya baik fisik maupun non fisik dari semua kegiatan proses internal dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan proses (*process approach*) untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
- 3) Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output dan keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Pendekatan sumber yang digunakan untuk memberikan gambaran efektivitas organisasi berdasarkan sumber-sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan pendekatan sumber terdapat beberapa indikator sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa adanya sumber daya manusia

maka tidak akan ada kegiatan dan jika tidak ada kegiatan maka tujuan organisasi tidak akan berjalan dan tidak akan tercapai.

b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran diperlukan sebagai penunjang operasional pelaksanaan kegiatan suatu organisasi. Suatu program akan berjalan apabila memiliki sumber daya anggaran, anggaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan menunjang sarana dan prasarana.

c. Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Guna mendukung kerja ataupun kegiatan suatu organisasi maka sangat memerlukan sarana maupun prasarana yang berguna untuk pendukung kegiatan sumber daya manusia. Adanya sarana dan prasarana yang memadai sebagai bentuk efisiensi karena sebagai media yang menopang kerja manusia. Jika sumber daya manusia yang cukup dan adanya sumber daya sarana dan prasarana yang memadai maka akan menghasilkan organisasi yang efektif. Untuk pendekatan proses berkaitan dengan proses pelaksanaan atau mekanisme. Sedangkan pendekatan sasaran terdiri dari tiga indikator yakni : a). Lingkungan, b). Ekonomi dan c). Sosial .

b. Indikator efektivitas

Menurut Keban 2008 (dalam Adelina 2020) mengemukakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuan dari organisasi yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah ditetapkan dalam visi dan misi dapat

tercapai. Selain itu menurut Duncan (dalam Adelina, 2020) mengemukakan bahwa indikator efektivitas mencakup sebagai berikut :

a) Pencapaian tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya dalam mencapai tujuan yang dipandang sebagai suatu proses. Dalam menentukan sebuah tujuan yang baik harus mengandung unsur-unsur SMART (*specific, measurable, achievable, realistik, timebound*). Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, maka diperlukan pertahap, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagian maupun pertahapan dalam arti periodesasinya pencapaian tujuan terdiri dari sub indikator , yaitu memiliki hasil yang dapat di ukur dan sasaran merupakan target kongret, memiliki sumber daya yang mendukung dan memiliki periode waktu tertentu.

b) Integrasi

Integrasi adalah pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integritas menyangkut proses sosialisasi dan komunikasi.

c) Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri beberapa faktor yaitu pengikatan kemampuan, sarana dan prasarana. Dalam penelitian ini adaptasi dijadikan sebagai alat ukur

keefektivan sebuah organisasi menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

Indikator selanjutnya yang dapat mengukur efektivitas yaitu menurut Richard Dan M.Streers (Dalam Yudhaningsih, 2011) menjelaskan :

1. Kemampuan menyesuaikan diri

Pada dasarnya kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasan tersebut menyebabkan manusia itu tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Richard m. streers yang mengatakan bahwa kunci dari keberhasilan suatu organisasi adalah dengan melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan. Setiap orang yang masuk kedalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam maupun diluar organisasi tersebut. Jika kemampuan dalam penyesuaian diri itu dapat berjalan maka tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Prestasi kerja

Prestasi kerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang di dasarkan oleh kemampuan, pengalaman, maupun kesanggupannya dalam melakukan suatu pekerjaan.

3. Kepuasan kerja

Kepuasan kerja merupakan tingkat kesenangan yang dirasakan oleh seseorang atas pekerjaan yang dilakukannya. atau disebut dengan emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas

Menurut Richard M. Steers (1985:209) dalam Evan Sarli Rakasiwi menjelaskan ada empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu sebagai berikut :

- a) Karakteristik organisasi merupakan hubungan yang sifatnya relative tetap seperti susunan sumberdaya manusia yang terdapat dalam organisasi. Dengan membuat struktur dan menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur tersebut manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relative tetap yang akan menempatkan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
- b) Karakteristik lingkungan, yaitu mencakup dua aspek, aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada diluar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek yang kedua yaitu lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan berada dalam lingkungan organisasi.
- c) Karakteristik pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Didalam diri setiap individu akan ditemukan banyak

perbedaan akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi, apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

- d) Karakteristik manajemen adalah strategi dan mekanisme kerja yang dirancang untuk merekomendasikan semua hal yang di dalam organisasi sehingga efektivitas tercapai. Kebijakan dan praktek manajemen merupakan alat bagi pemimpin untuk mengarahkan setiap kegiatan guna mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam melaksanakan kebijakan dan praktek manajemen harus memperhatikan manusia, tidak hanya mementingkan strategi dan mekanisme kerja saja. Mekanisme ini meliputi penyusunan tujuan strategis, pencapaian dan pemanfaatan atas sumberdaya. Proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, serta adaptasi terhadap perubahan lingkungan inovasi organisasi.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah bentuk tercapainya suatu tujuan dari kegiatan-kegiatan atau program yang telah dilakukan dan ditetapkan secara baik, optimal dan tepat kerja sasaran.

2. Kinerja organisasi

Menurut Stoner 1978 mengemukakan bahwa kinerja adalah fungsi dari motivasi, kecakapan dan persepsi peranan. Indra Bastian dalam Irham Fahmi (2016) juga menyatakan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian

pelaksana sesuatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi. Menurut Fahmi (2016) kinerja sebagai hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.

3. Konsep kinerja organisasi

Kinerja organisasi adalah sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan dengan usaha-usaha yang sistematis dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus mencapai keputusan secara efektif (Chaizi Nasucha dalam Irham Fahmi, 2016). Konsep kinerja dapat dilihat dari dua kategori, yaitu kinerja pegawai/karyawan dan kinerja organisasi (Pasolong : 2007) kinerja pegawai adalah hasil kerja perorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah keseluruhan hasil kerja yang dicapai suatu organisasi.

Menurut Pasolong (2010:186-189), ada tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja suatu organisasi, yaitu:

1. Kemampuan

Kemampuan menurut Robbins (2002) adalah suatu kapasitas individu untuk mengerjakan beberapa tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan dapat dilihat dari dua segi yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan mental sedangkan kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan dan keterampilan.

2. Kemauan

Kemauan menurut Robbins (2002) adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi. Kemauan atau motivasi kerja dipengaruhi oleh lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti lampu yang terang, ventilasi yang nyaman dan sejuk serta ruangan yang bebas dari gangguan suara berisik. Sedangkan lingkungan sosial yaitu suatu keadaan dimana pegawai suatu instansi/organisasi tidak hanya mengharapkan penghasilan tetapi juga penghargaan.

3. Energi

Energi menurut Jordan E. Ayan (2002) adalah pemercik api yang menyalakan nyawa. Apabila seseorang mengalir energi di dalam dirinya maka biasanya orang itu sangat tanggap terhadap tugas.

4. Teknologi

Teknologi menurut Gibson,dkk (1997) adalah tindakan fisik dan mental oleh seseorang untuk mengubah bentuk atau isi dari objek atau ide. Jadi, teknologi dapat dikatakan sebagai tindakan yang dikerjakan oleh individu atau suatu objek dengan atau tanpa bantuan alat atau alat mekanikal, untuk membuat beberapa perubahan terhadap objek tersebut.

5. Kompensasi

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pegawai sebagai balas jasa atas kinerja dan bermanfaat baginya. Apabila pegawai mendapat kompensasi yang seimbang dengan hasil kerjanya maka pegawai dapat bekerja dengan tenang dan tekun.

6. Kejelasan tujuan

Apabila pegawai tidak mengetahui dengan jelas tujuan pekerjaan yang ingin dicapai maka tujuan yang tercapai tidak efisien atau kurang efektif.

7. Keamanan

Keamanan pekerjaan menurut George Strauss & Leonard Sayles (1990), adalah sebuah kebutuhan manusia yang fundamental, karena pada umumnya orang menyatakan lebih penting keamanan pekerjaan daripada gaji atau kenaikan pangkat.

4. Pengukuran Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja dalam organisasi bukanlah sesuatu aktivitas yang baru. Pengukuran kinerja pada dasarnya digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pengukuran kinerja diharapkan organisasi dapat mengetahui kinerja dalam suatu periode tertentu dan segala kegiatan yang dilakukan dapat diukur dan dievaluasi. Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2010:182), penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya.

Nawawi (2013:235-236), ada beberapa peranan penting pengukuran kinerja sebagai alat manajemen yaitu untuk:

1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja.
2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati
3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkan dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atau prestasi pelaksana yang telah diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi.
6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
9. Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.
10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

5. Konsep penanggulangan Bencana

a. Pengertian bencana

Di dalam undang-undang no 24 tahun 2017 pasal 1 ayat (1), disebutkan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang

disebabkan, baik oleh faktoraalan dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Carter dalam Muis (2018) menjelaskan bencana sebagai suatu kejadian alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau progresive, yang menimbulkan dampak yang dahsyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dnegan tindakan-tindakan luar biasa.

Subdibyakto dalam Zikri (2019:119) menyebutkan bahwa bencana adalah kejadian yang terjadi baik oleh alam maupun manusia itu sendiri. Bencana mengakibatkan korban dan penderitaan bagi manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, srana dan prasarana serta dapat menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.

Kemudian Rautela dalam Kusumasari (2014:3) menekankan bahwa bencana merupakan sebuah kondisi kerusakan dan guncangan yang menyebabkan kehancuran pada struktur sosial serta populasi yang terkena dampak bencana tidak mampu mengatasi peristiwa tersebut dan membutuhkan bantuan pihak luar.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa yang di akibatkan oleh alam ataupun manusia maupun gabungan dari keduanya yang dampaknya telah mengganggu penghidupan masyarakat dimana ada kerugian secara material ataupun non

material disebut sebagai bencana. Dampak dari bencana itu sendiri meliputi kerugian harta benda, kerusakan lingkungan dan dampak psikologis yang menyebabkan terganggunya fungsional sosial suatu komunitas.

b. penanggulangan bencana

dalam kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Penanggulangan bencana di artikan sebagai upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pecegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat dan setelah bencana (UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana).

Dalam pasal 4 Undang-Undang Republik indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang tujuan penanggulangan bencana menyebutkan bahwa tujuan dari penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

- a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi, dan menyeluruh;
- d) Menghargai budaya lokal;
- e) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan; dan

g) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tahapan dalam penanggulangan bencana

a. Pra bencana

Bencana merupakan hal yang terduga dan hampir seluruhnya datang mendadak, oleh karena itu perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apabila terjadi musibah. Apalagi pada daerah yang tidak terduga akan terjadi bencana, karena termasuk daerah yang tidak rawan bencana, sebab sudah puluhan tahun tidak terjadinya bencana di daerah tersebut. oleh karena itu tahap ini dapat dilakukan dari pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi.

b. Tanggap darurat

Tujuan dari diselenggarakannya tanggap darurat adalah untuk menyelamatkan kelangsungan kehidupan manusia, mengurangi penderitaan korban bencana dan meminimalkan kerugian material. Penanganan saat terjadinya bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika bencana melanda, yang tujuannya adalah menyelamatkan korban dan harta benda. Dan meliputi kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, distribusi atau penyaluran bantuan dalam bentuk pangan, sandnag, obat-obatan bahan bangunan, peralatan (ekonomis-produktif) seperti alat pertanian dan pertukangan serta uang sebagai modal awal hidup pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material(harta benda). Pada tahap tanggap darurat bencana ini tidsk dapat

dilakukan secara mandiri dan perlu dukungan dan bantuan dari banyak instansi.

c. Pasca bencana

Bantuan kemanusiaan, Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah segala bentuk upaya kegiatan yang dilaksanakan setelah terjadinya bencana, secara berturut-turut menyelamatkan nyawa manusia dan memenuhi kebutuhan kemanusiaan yang mendesak, memulihkan kegiatan normal dan memulihkan infrastruktur fisik serta pelayanan masyarakat, kesehatan dan keselamatan, rekonstruksi program konseling dan studi mengenai dampak ekonomi yang di timbulkan.

Penanggulangan bencana diawali pada fase prabencana yakni dengan menganalisis resiko bencana berdasarkan ancaman/bahaya dan kerentanan, untuk meningkatkan kemampuan dalam manajemen dan mengurangi resiko, serta mengurangi dampak bencana yang ditimbulkan. Manajemen bencana dilakukan bersama oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder), lintas sektor dan dengan pemberdayaan masyarakat.

c. Indikator Penanggulangan Bencana

Pasal 1 undang-undang no 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjelaskan indikator-indikator penanggulangan bencana. Adapun indikator penanggulangan bencana tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana

- 2) Tanggap darurat bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang di timbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana.
- 3) Rehabilitas merupakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
- 4) Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

d. Tanah Longsor

Tanah longsor dalam bahasa inggris disebut lindslide yang berarti perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah atau material campuran tersebut yang bergerak ke bawah atau keluar lereng. (Muis 2018:24). Longsor merupakan suatu bentuk bencana yang sering terjadi di daerah-daerah indonesia, bencana ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menyebabkan terganggunya

infrastruktur di daerah. Posisi Indonesia yang saat ini terletak pada pertemuan tiga lempeng besar yaitu lempeng benua Australia di selatan, lempeng benua Eurasia di barat dan lempeng Samudera Pasifik di timur, sehingga terbentuklah jalur gunung api yang aktif dan jalur gempa bumi. Dengan adanya tumbukan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan terjadinya zona penunjangan yang merupakan jalur gempa bumi dan membentuk undulasi di busur kepulauan dengan kemiringan terjal sampai sangat terjal.

Disamping itu, Indonesia juga terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi, dan memiliki topografi yang bervariasi. Dengan posisi yang demikian sudah tentu Indonesia tidak bisa terelakan dari berbagai bencana yang selalu melanda baik itu longsor lahan, letusan gunung api, gempa bumi, dan banjir. (BAKORNAS PB, 2007) dalam Ferad Putuhuru (2015).

Nursaban (2010) dalam Ferad Putuhuru (2015) mendefinisikan longsor sebagai suatu produk gangguan keseimbangan lereng yang menyebabkan bergesernya massa tanah dan batuan ke tempat yang lebih rendah. Gerakan ini dapat terjadi pada tanah yang hambatan tananah atau batumannya lebih kecil dibanding dengan berat massa tanah atau batuan itu sendiri.

Menurut Sitorus (2006) dalam Dedi Hermon 2012 penyebab terjadinya bencana longsor secara umum dapat dibedakan atas tiga yaitu :

1. Kondisi alam yang bersifat statis, seperti kondisi geografis, topografi, dan karakteristik sungai
2. Peristiwa alam yang bersifat dinamis, seperti perubahan iklim global, pasang surut, *land subsidence*, sedimentasi, serta
3. Aktivitas sosial-ekonomi manusia yang sangat dinamis seperti deforestasi (pengundulan hutan), konversi lahan pada kawasan lindung, pemanfaatan sempadan sungai/saluran untuk perumahan, pemanfaatan wilayah retensi banjir, perilaku masyarakat, keterbatasan sarana dan prasarana pengendalian banjir.

Sedangkan menurut Lopez dan zinck (1991), mersaid (2002), degraff dan rogers (2003) dan atzeni et al (2003) dalam Dedi hermon 2012 menyatakan bahwa penyebab terjadinya longsor adalah :

1. Curah hujan
2. Sifat fisik tanah
3. Kemiringan lereng
4. Sedimen yang tidak kompak (unconsolidated)
5. Batuan penyusun tanah
6. Kedalaman solum tanah (kedalaman pelapukan batuan)
7. Aktivitas gempa
8. Kegiatan gunung api yang aktif
9. Degradasi lingkungan

Sementara itu selain dari penyebab terjadinya longsor ada pula faktor yang menyebabkan terjadinya longsor, yaitu faktor alamiah dan faktor non alamiah.

1. Faktor alamiah penyebab terjadinya longsor adalah :

- a. Kondisi geologi, yaitu adanya jalur-jalur pathan dan rekahan batuan yang mengakibatkan kondisilereng mempunyai kemiringan $>30\%$ dan tumpukan tanah liat pasir di atas batuan kecap air berupa andesit dan breksi andesit
- b. Kondisi curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya
- c. Sistem hidrologi (tata air) pada daerah lereng

2. Sedangkan faktor non alamiah penyebab terjadinya longsor adalah:

- a. Pembukaan hutan secara sebarangan, penanaman jenis tanaman yang terlalu berat dengan jarak tanam yang terlalu rapat
- b. Pemotongan tebing/lereng untuk jalan dan pemukiman secara tidak teratur.

Longsor dapat menyebabkan dampak yang cukup besar seperti kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda. Kerugian-kerugian yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. (Arifin, Carolita & Winarso 2006). Kerugian tersebut seperti hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan terganggunya ekosistem alam (Alhasanah 2006 dalam Hamida 2019). Oleh karena itu perlu adanya tindakan penanganan khususnya di wilayah produktif, jalur ekonomi, pemukiman maupun infrastruktur umum (Zakaria 2010)

3. Konsep manajemen bencana

Khan dalam Zikri Alhadi (vol xiii no.1 th.2014) menjelaskan bahwa secara komprehensif defenisi dari manajemen bencana sebagai” *sum total of all activities, programmes and measures which can be taken up before, during and after a disaster with the purpose to avoida disaster, reduce its impact or recover from its losses*” (khan;46) untuk mencari solusi atas persoalan bencana yang merupakan masalah publik, maka di butuhkan manajemen bencana agar dampak buruk dari bencana bisa direduksi. Manajemen bencana seperti yang dijelaskan asia disaster prepereadness ccenter (ADPC), yaitu “*disaster manajemen includes adminisrative decisions and operasional activities that involve prevention, mitigation, preparedness, response, recovery, and rehabilitation*” (APDC, 2004:1-2).

Manajemen bencana merupakan sebuah proses yang terus menerus dimana pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil merencanakan dan mengurangi pengaruh bencana, mengambil tindakan segera setelah bencana terjadi, dan mengambil langkah-langkah untuk pemulihan (Susanto dalam Nisa 2014:103)

Kemudian (Kusumasari dalam Salwa 2019:52) menjelaskan bahwa manajemen bencana diartikan sebagai kolektif yang mencakup segala aspek perencanaan untuk merespon bencana, kegiatan-kegiatan prabencana dan pasca bencana yang mengarah pada manajemen risiko dan konsekuensi bencana.

Menurut WHO (World Health Organization) dalam (Jack Pinckowski, 2007: 17) perencanaan penanggulangan bencana yang baik adalah perencanaan yang memiliki empat elemen perencanaan, yaitu rencana kesiapan, rencana kontingensi, rencana operasi kedaruratan, dan rencana pemulihan,

Carter mendefinisikan pengelolaan bencana sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respons darurat dan pemulihan. Sedangkan pengelolaan bencana terpadu didefinisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan bencana dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam tujuan mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial, khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok/tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem-ekosistem penting. Proses ini mengimplementasikan suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan-tindakan yang terorganisir terkait dengan pencegahan, pengurangan, persiapan, respons darurat dan pemulihan (Kodoatie, 2008).

Maka dapat disimpulkan Manajemen bencana merupakan serangkaian usaha yang berkelanjutan untuk bagaimana meminimalisir resiko atau dampak terjadinya bencana seperti korban jiwa, harta dan benda. Rangkaian kegiatan

tersebut dapat dilakukan sejak pra bencana ketika tanggap darurat dan pasca bencana. Kesadaran masyarakat masih sangat rendah dalam pengelolaan bencana sehingga ketika terjadi bencana timbul kepanikan dan mereka tidak tau apa yang harus dilakukan. Salah satu faktor yang menjadi pengelolaan bencana belum juga terlaksana dengan baik adalah kesadaran masyarakat dan sikap peduli yang masih kurang dalam penanggulangan bencana.

Tujuan manajemen bencana secara sederhana tentu saja meminimalisir jatuhnya korban jiwa dan harta benda. Banyak pihak yang kurang menyadari pentingnya mengelola bencana dengan baik. Salah satu faktornya adalah bencana belum tahu kapan dan dimana pastinya akan terjadi walaupun ancamannya bisa diperkirakan. Untuk tujuan itulah manajemen bencana diperlukan agar manusia senantiasa siap jika bencana itu sewaktu-waktu terjadi. Djohanpoetro menjelaskan tujuan dari manajemen bencana adalah sebagai berikut:

- a. Menghindari kerugian pada individu, masyarakat, maupun negara melalui tindakan dini (sebelum bencana terjadi). Tindakan ini termasuk ke dalam tindakan pencegahan. Oleh karenanya, tindakan menghindari ini efektif sebelum bencana itu terjadi.
- b. Meminimalisasi kerugian pada individu, masyarakat, maupun negara berupa kerugian yang berkaitan dengan orang, fisik, ekonomi, dan lingkungan bila bencana tersebut terjadi. Tujuannya adalah agar bisa meminimalisasi kerugian akan efektif bila bencana itu telah terjadi.

- c. Meminimalisasi penderitaan yang ditanggung oleh individu dan masyarakat yang terkena bencana. Ada juga yang menyebut tindakan ini sebagai pengentasan. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu dan masyarakat yang terkena bencana supaya bisa bertahan hidup dengan cara melemaskan penderitaan yang langsung terjadi pada mereka yang terkena bencana.
- d. Untuk memperbaiki kondisi sehingga individu dan masyarakat dapat mengatasi permasalahan akibat bencana. Perbaikan kondisi terutama diarahkan kepada perbaikan infrastruktur seperti jalan, listrik, penyediaan air bersih, sarana komunikasi, dan sebagainya.
- e. Untuk mempercepat pemulihan kondisi sehingga individu dan masyarakat bangkit ke kondisi sebelum bencana, atau bahkan mengejar ketinggalan dari individu atau masyarakat lain yang tidak terkena bencana. Perbaikan infrastruktur seperti dijelaskan di atas tidaklah cukup. Itu hanya mengembalikan ke kondisi semula sehingga aktivitas ekonomi dan sosial berjalan dengan baik sebagaimana layaknya sebuah wilayah (Djohanputro)

Dalam manajemen bencana dikenal 4 tahapan kerja dalam penanggulangan bencana yaitu:

1. Fase pencegahan dan mitigasi; dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana tujuannya untuk memperkecil dampak negatif bencana
2. Fase kesiapsiagaan (preparedness); dilakukan pada situasi terdapat potensi bencana dengan merencanakan bagaimana menanggapi bencana.

Kesiapsiagaan, menurut Gillespie dan Streeter (1987) dalam (Bevaola Kusumasari, 2014: 24) adalah sebagai perencanaan, identifikasi sumber daya, sistem peringatan dan pelatihan, simulasi, dan tindakan prabencana lainnya yang diambil untuk tujuan utama meningkatkan keamanan dan efektifitas respons masyarakat selama bencana.

3. Fase tanggap darurat (emergency response); dilakukan pada saat terjadi bencana tujuan untuk mengurangi dampak negatif pada saat bencana.
4. Fase pemulihan (recovery); dilakukan setelah terjadi bencana tujuannya untuk mengembalikan masyarakat pada kondisi normal.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

1. Penelitian yang serupa dengan penelitian yang dilakukan diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Wangka, After Son (2018) yang berjudul “Efektivitas BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Bandang Di Kecamatan Tahua Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe”. Dimana dalam penelitiannya ditemukan berdasarkan beberapa indikator yang dijadikan fokus penelitian yang dibahas dalam mengukur efektivitas dari badan penanggulangan bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan dalam hal kualitas pelayanan saat status kondisi darurat bencana, bahwa badan penanggulangan bencana daerah sudah bekerja dengan baik, dan memahami tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pelayanan ditengah masyarakat dengan memahami program yang mereka emban. Soal ketepatan waktu dan sasaran badan penanggulangan bencana daerah sudah mampu dan memberikan loyalitas pelayanan terbaik pad masyarakat juga pada pemerintah daerah sebagai atasan. Kemudian tercapainya tujuan dari badan

penanggulangan bencana daerah dengan program-program yang sudah direncanakan ataupun pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat baik pada kondisi normal maupun pada saat kondisi darurat bencana.

2. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh sadat, anwar (2016) yang berjudul “ efektivitas kinerja badan penanggulangan bencana daerah dalam pengurangan resiko bencana di kota baubau”. Dimana dari hasil penelitian penelitiannya bahwa efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana pada badanpenanggulangan bencana daerah kota baubau suatu pencapaian hasil ynag memuaskan dalam produktifitas aparat, kualitas layanan korban bencana banjir responsiitas dalam kemampuan aparat badan penanggulangan bencana daerah kota baubau untuk mengenali kebutuhan korban bencana. Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir pemerintah kota baubau pada dasarnya mempunyai langkah-langkah untuk semua macam bencana adalah sama dan dilaksanakan melalui tahap-tahap pra bencana, saat tanggap darurat, pasca bencana merupakan upaya badan penanggulangan bencana daerah yang dapat mempengaruhi faktor-faktor kinerja pemerintah dalam penanggulangan bencana daerah pada badan penanggulangan bencana daerah kota baubau.Penanggulangan resiko bencana pada badan penanggulangan bencana daerah kota baubau merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang

terancam bencana dengan tangguang jawab baik masyarakat yang terkena bencana.

3. Kajian penelitian yang dilakukan oleh Amni Zarkasyi Rahman (2015) tentang “mitigasi bencana tanah longsor di kabupaten banjarnegara” penelitian ini menggambarkan beberapa hal terkait dengan upaya mitigasi struktural maupun non struktur fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya peningkatan efektifitas mitigasi bencana tanah longsor dengan menjadikan masyarakat tangguh bencana. Dengan melihat kondisi kabupaten banjarnegara yang sebagian besar wilayahnya rawan terhadap bencana. Penelitian ini juga menggambarkan sitem peringatan dini gerakan tanah (*lindsides early warning system*), tujuan dipasangnya alat deteksi pergerakan tanah ini adalah untuk memantau adanya pergerakan tanah hingga batas kondisi kritis sirine tersebut berbunyi.
4. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mufis Mugron, Maulana (2015) yang berjudul “efektivitas badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam pelaksanaan program kelurahan siaga bencana di kota semarang” yang mana dalam berdasarkan penelitian ini ditemukan faktor yang mempengaruhi BPBD kota semarang dalam pelaksanaan program kelurahan siaga bencana di kota semarang yaitu, a). Ciri organisasi, BPBD selaku pelaksana program kelurahan siaga bencana di kota semarang memberikan fasilitas pinjam pakai kepada semua kelurahan siaga bencanayang telah terbentuk, tetapi fasilitas pinjam pakai yag diberikan oleh BPBD masih belum mencukupi, terutama untuk kotak P3K dan jaket pelampung. b). Ciri

lingkungan, masyarakat pada golongan remaja masih belum banyak yang memiliki kesadaran mengenai kebencanaan dan partisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD masih rendah, c). Ciri pekerja, pekerja atau tim rescue terlibat langsung dalam pendamping maupun pelatihan kepada masyarakat kelurahan siaga bencana harus memiliki keahlian khusus di bidang kebencanaan dan keselamatan, d). Kebijakan dan praktek manajemen, belum tersedianya kebijakan pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan

C. Kerangka konseptual

Efektifitas penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam merupakan bentuk penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD kabupaten agam untuk mengantisipasi terjadinya bencana Longsor yang terjadi bukan hanya karena faktor alam akan tetapi juga oleh ulah tangan manusia yang melakukan penebangan pohon secara ilegal terutama pada area perbukitan yang rentan terjadinya bencana longsor.

Longsor dapat menyebabkan dampak yang cukup besar seperti kerusakan lingkungan dan kerugian harta benda. Kerugian-kerugian yang dialami dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Kerugian tersebut seperti hilangnya nyawa, rusaknya harta benda dan terganggunya ekosistem alam Oleh karena itu perlu adanya tindakan penanganan khususnya di wilayah produktif, jlaur ekonomi, pemukiman maupun insfranstruktur umum.

Sesuai dengan undang-undang No 24 tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu

kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam maupun non alam, dan juga faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan psikologis.

ada beberapa faktor penyebab terjadinya longsor di kabupaten agam diantaranya faktor - Faktor alamiah penyebab terjadinya longsor adalah :Kondisi geologi, yaitu adanya jalur-jalur patahan dan rekahan batuan yang mengakibatkan kondisi lereng mempunyai kemiringan >30% dan tumpukan tanah liat pasir di atas batuan ke arah air berupa andesit dan breksi andesit, Kondisi curah hujan yang cukup tinggi setiap tahunnya, Sistem hidrologi (tata air) pada daerah lereng, Sedangkan faktor non alamiah penyebab terjadinya longsor adalah: Pembukaan/pengundulan hutan secara sebarangan, penanaman jenis tanaman yang terlalu berat dengan jarak tanam yang terlalu rapat, Pemotongan tebing/lereng untuk jalan dan pemukiman secara tidak teratur.

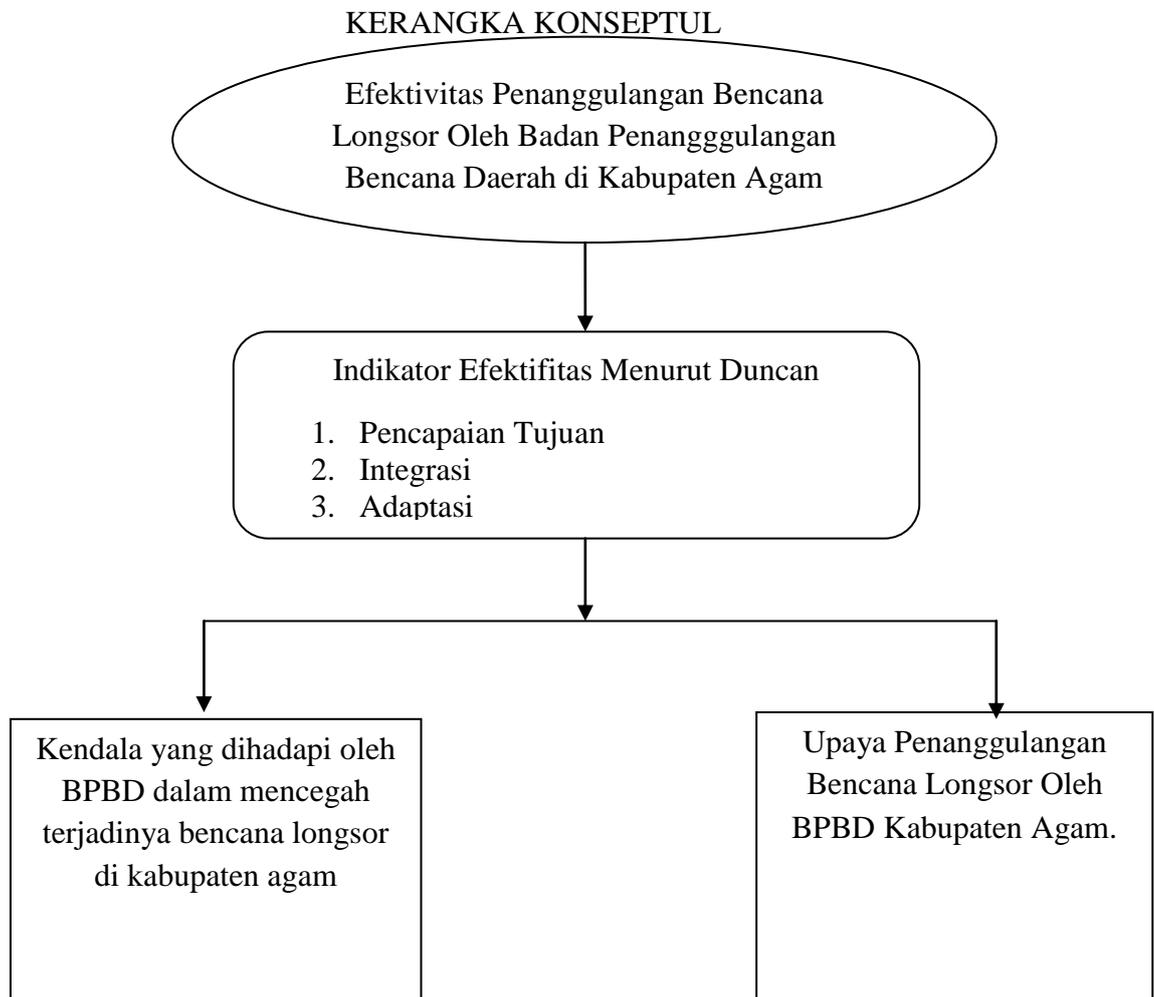
Selanjutnya berdasarkan pendapat Duncan dalam Adelina bahwasanya efektivitas dapat dilihat dari segi yang pertama yaitu pencapaian tujuan, kedua integritas dan ketiga adaptasi, adapun pencapaian tujuan ini adalah dengan mengetahui bagaimana proses pencapaian tujuan dalam melakukan penanggulangan bencana longsor oleh BPBD Kabupaten Agam. Yang kedua dilihat dari segi integritas yaitu bagaimana jalannya program-program penanggulangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam dengan melihat tingkat kemampuan organisasi tersebut yang menyangkut proses sosialisasi dan komunikasi. Dan yang ketiga dilihat dari segi adaptasi, yaitu melihat bagaimana strategi BPBD dalam melakukan penanggulangan bencana longsor

dikabupaten agam dengan melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya.

Kemudian berdasarkan penjelasan diatas teori di atas yang dipakai oleh Duncan dalam (Adelina 2020) yang menjelaskan bahwa teori yang dipakai dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ditemui oleh peneliti yang dimana teori ini akan melihat hasil dari Efektivitas Penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Agam.

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan diteliti dengan tujuan yang digunakan dalam rangka membantu jalannya penelitian.

Berikut adalah skema gambaran kerangka konseptual dalam penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah dilakukan peneliti tentang efektivitas penanggulangan bencana longsor yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Agam maka dapat dirumuskan kesimpulan penelitian ini bahwa penanggulangan bencana longsor di Kabupaten Agam belum berjalan dengan maksimal, dan dapat dikatakan tidak efektif, karena masih terdapat permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam.

1. Efektivitas penanggulangan bencana longsor oleh badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Agam

Dapat dikatakan bahwasanya penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam tidak efektif dikarenakan sarana maupun prasarana yang digunakan dalam penanggulangan masih belum memadai. Dan faktor cuaca yang tidak mendukung atau kejadian bencana yang diakibatkan oleh faktor alam yang tidak bisa dihindari. Dan tidak efektifnya penanggulangan bencana longsor di kabupaten agam penyebab utama adalah faktor alam dan juga permasalahan maupun kendala yang dihadapi oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten agam masih kurang optimal dalam menanggulangi bencana longsor. Semua itu dilihat dari faktor pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam dalam menanggulangi bencana longsor.

Yang pertama dilihat dari segi pencapaian tujuan yang dilakukan oleh BPBD kabupaten agam dalam melakukan penanggulangan bencana longsor, hasil temuan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencapaian tujuan masih banyak permasalahan dan kendala yang ditemukan di lapangan. Seperti masih minimnya peralatan yang digunakan dalam penanggulangan bencana, sehingga memakan waktu yang lama untuk melakukan penanggulangan. Sehingga untuk efektivitas penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam masih kurang optimal untuk melakukan penanggulangan bencana longsor. Yang kedua yaitu integrasi BPBD kabupaten agam dalam melakukan penanggulangan bencana longsor. Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwasanya komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam dengan stakeholder terkait dalam penanggulangan bencana sudah baik, yaitu dengan sama-sama datang kelokasi bencana longsor dan melakukan tugas masing-masing. Dan yang ketiga yaitu adaptasi, bentuk adaptasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam yaitu dilihat dari bagaimana BPBD Kabupaten Agam dan stakeholder yang terlibat dalam menanggulangi bencana longsor bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, kemudian BPBD dalam melaksanakan tugasnya menjadi agak kaku dikarenakan berpedoman kepada tupoksi yang telah ditentukan, sementara masyarakat lebih membutuhkan perhatian dari aparaturnegara.

2. kendala-kendala yang dihadapi oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Agam dalam menanggulangi bencana longsor.

Kendala yang dihadapi oleh kabupaten agam yang pertama kendala internal yaitu kendala yang berasal dari organisasi itu sendiri, kendala internal yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Agam yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan penanggulangan masih minim, personil untuk melakukan penanggulangan masih jauh dari harapan dan kekurangan anggaran dalam melakukan penanggulangan bencana longsor. Yang kedua yaitu kendala eksternal, yaitu kendala yang berasal dari luar organisasi, kendala eksternal yang dihadapi oleh BPBD kabupaten agam adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat,

3. upaya yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kabupaten agam dalam menanggulangi bencana longsor

Dapat disimpulkan bahwasanya upaya yang dilakukan oleh BPBD kabupaten agam dalam menanggulangi bencana longsor yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dengan menentukan titik-titik rawan longsor, dan diharapkan kepada masyarakat tetap waspada, dan upaya menjadikan masyarakat yang tangguh bencana. dalam artian masyarakat yang mampu mengantisipasi dan meminimalisir kekuatan yang merusak, melalui adaptasi. Mereka juga mampu mengelola dan menjaga struktur dan fungsi dasar tertentu ketika terjadinya bencana,

apabila terdampak bencana mereka bisa membangun kehidupannya menjadi normal kembali.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat diajukan untuk mengoptimalkan efektivitas penanggulangan bencana longsor oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten di kabupaten

1. Disarankan kepada pemerintah maupun BPBD Kabupaten Agam dalam menanggulangi bencana longsor, agar lebih tegas dan lebih serius lagi dalam menanggapi bencana longsor, agar dapat meminimalisir dampak yang terjadi akibat bencana tersebut
2. Bagi masyarakat Kabupaten Agam sudah seharusnya meningkatkan kesadaran akan potensi bencana dan dampak bencana, dan diharapkan memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana
3. Bagi BPBD Kabupaten Agam perlu adanya pelatihan-pelatihan terhadap tim-tim yang perlu dibentuk untuk melakukan penanggulangan bencana.

DAFTAR PUSTAKA

Journal / Article

- Alhadi. 2014. *Kesiapan Jalur dan Evakuasi Publik Menghadapi Resiko Bencana Gempa Dan Stunami di Kota Padang (Studi Manajemen Bencana)*. Humanus. Vol.xiii.No.1 2014
- Aurellia Chintia Deby. 2019. *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Tahap Kesiapsiagaan*. Jurnal Respon Publik. Vol 13 No.3
- Arifin.S., Carolita.,I.& Winarso,G.2006. *implementasi penginderaan jauh dan SIG untuk inventarisasi daerah rawan bencana longsor dan pengolahan data citra digital*. Vol 3 No 1 juni.2006
- Aini,Nur dkk. 2017. Efektivitas program desa tangguh bencana di desa sirnobojo kecamatan pacitan kabupaten pacitan. Universitas brawijaya
- Burhanudin, Mukhamat. 2017. *Reformasi Administrasi Dalam Manajemen Bencana*. Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Vol 1. No.2 Desember 2017
- Bakorna PB,2006. Panduan Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia, Sat Bakornas PBP, Jakarta
- Diah Wulansari. 2017. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Manajemen Bencana*. Journal Of Governance And Public Policy. Vol 4 No.3 Oktober 2017
- Dhuha Ginanjar dkk. 2016. *Analisis Penentuan Zonasi Risiko Bencana Tanah Longsor Berbasis Sistem Informasi Geografis(studi kasus kabupaten sleman)*. Jurnal Geodesi Undip. Vol 5 No. 1 Januari 2016
- Dzakiyul Mubarrak,Dkk. 2017. Kesiapsiagaan tunanetra terhadap bencana gempa bumi dan tsunami. Pascasarjana universitas syiah kuala : Jurnal ilmu kebencanaan. Vol 4 no 2. Mei 2017
- Erdina, Tyas Vela. 2016. Analisis Efektivitas Organisasi Dalam program pelayananAdministrasi Terpadu Kcamatan (PATEN) Di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Gunawan Pratama. 2017. *Analisis Penanggulangan bencana banjir oleh badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) kota bengkulu*

- Gottschalk,Louis, 1986. Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto). UI-Press, jakarta
- Hamida,fakhryza nabila.,widyasamratri,hasti. 2019. Risiko *kawasan longsor dalam upaya mitigasi bencana menggunakan sistem informasi geografis*. Jurnal pondasi. Vol 24 No 1
- Kodoatie dan Sjarief, 2009. Pengelolaan Bencana Terpadu. Nuansa Aulia, Bandung
- Fahmi, irham.2016. perilaku organisasi: teori, aplikasi dan kasus. Bandung : alfabeta.
- Nadian Mareta.2014. pengetahuan dan manajemen bencana.
- Sriharini. 2010. *Membangun Masyarakat Sadar Bencana*. Jurnal dakwah. Vol Xi. No.2 Juli-Desember 2010
- Sadat, Anwar. 2016. Efektivitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengurangan Resiko Bencana Di Kota Baubau.*Jurnal*. Universitas Muhammdiyah Buton
- Wahyudi,Yoyok.2017.sinergi satuan komando kewilayahan dengan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam. Jurnal strategi kampanye militer. Vol 3 no 3.
- Wangka, After Son. 2018. Efektivitas BPBD Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Bandang Di Kecamatan Tahua Barat Kabupaten Kepulauan Sangihe.*Jurnal*. Universitas Sam Ratulangi
- Z.Zakaria.2010. *Model Starlet Suatu Usulan Untuk Mitigasi Bencana Longsor Dengan Pendekatan Genetika Wilayah.(Studi Kasus : Longsoran Citatah , Padalarang,Jawa)*.*Jurnal Geologi Indonesia*, Vol 5 no 2 juni

Buku

- Donni juni priansa dan agus garnida, manajemen perkantoran efektif efesien dan profesional, bandung: alfabeta, 2013
- Dr,Sudaryono.2018.Metodologi Penelitian. Depok : Rajawali Pers
- Prastowo,Andi.2016. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

- Hermon, dedi. 2012. Mitigasi bencana hidrometeorologi. UNP press padang
- Moh. Pabundu Tika, budaya organisasi dan peningkatan kinerja perusahaan, jakarta: bumi aksara, 2014
- Mahmudi, manajemen kinerja sektor publik,yogyakarta :unit penerbit dan percetakan sekolah tinggi ilmu manajemen YKPN, 2015
- Moleong, Lexy J.2012. metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Remaja rosdakarya.
- Putuhuru, Ferad. 2015. Mitigasi bencana dan penginderaab jauh. GRAHA ILMU : Yogyakarta

Peraturan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang penanggulangan bencana
- UU No 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden No 8 Tahun 2008 tentang badan nasional penanggulangan bencana
- Peraturan Daerah Kabupaten Agam No 01 Tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten agam

Media sosial

- Rahmat Hidayat, 2019. www.harianhaluan.com. *Longsor Hantam Kantor Jorong Dan Rumah Warga Di Tanjung Sani*. Akses Ahad, 22 Desember 2019 17:26:36 WIB
- Jeka Kampai, 2019. <https://news.detik.com> , *Banjir Bandang Agam Adanya Illegal Logging Cagar Alam di Maninjau*. Akses Jumat, 22 Nov 2019 19:08 WIB
- Altas Maulana, 2019. www.antaraneews.com , tanah longsor terjadi di 30 lokasi dikabupaten agam. Akses jumat 20 desember 2019 15:17 WIB